

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab V ini akan disajikan kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian, dan selanjutnya disampaikan pula beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan naturalistik, kesimpulan hasil penelitian ini tidak bersifat generalistik melainkan berupa rekapitulasi makna esensial, khususnya yang terjadi di SMU Pasundan 2 Kodya Bandung. Berdasarkan fokus masalah, pertanyaan penelitian, pengumpulan data dan pembahasan hasilnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Posisi aspek budi pekerti dalam materi pelajaran PPKn, dapat dilihat dalam hal sebagai berikut.
 - a. Posisi aspek budi pekerti dalam pembelajaran PPKn, khususnya pada pokok bahasan kedisiplinan dan ketaatan, secara material terdapat dalam GBPP PPKn Kurikulum SMU 1994, satuan pelajaran, dan buku sumber yang digunakan. Ternyata dalam GBPP PPKn kurikulum 1994 sarat dengan muatan aspek budi pekerti yang harus dikembangkan oleh guru dalam proses pembelajaran.
 - b. Pada buku sumber yang digunakan oleh guru PPKn, ternyata materi aspek budi pekerti dalam pokok bahasan kedisiplinan lebih tampak dibandingkan dengan pokok bahasan ketaatan. Posisi aspek budi pekerti pada pokok bahasan ketaatan

kurang seimbang bila dibandingkan dengan materi yang lainnya, sehingga menuntut guru PPKn untuk memperkaya materi dengan sumber yang lain.

- 2) Posisi aspek budi pekerti dalam pola pengajaran PPKn, dapat dilihat dalam hal sebagai berikut.
 - a. Hasil penelaahan satuan pelajaran pokok bahasan kedisiplinan dan ketaatan sebagai pola pengajaran yang disusun oleh guru PPKn, ternyata muatan aspek budi pekerti pada pokok bahasan tersebut belum terposisikan secara proporsional. Hal ini dapat dilihat dari rumusan tujuan pembelajaran khusus, materi pelajaran, serta evaluasi yang akan digunakannya. Tampak bahwa aspek kognitif pada rumusan ketiga komponen tersebut lebih dominan apabila dibandingkan dengan aspek sikap dan perilaku siswa.
 - b. Orientasi pengetahuan ini selain berhubungan dengan kemampuan teknis guru, juga dalam rangka kesiapan siswa menghadapi ulangan catur wulan dan EBTANAS. Sedangkan dalam rumusan kegiatan belajar mengajar menggunakan pendekatan keterampilan proses dengan metode ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi dan pemberian tugas. Jadi, terposisikannya aspek budi pekerti dalam hal ini sangat tergantung kepada pelaksanaannya.
- 3) Posisi aspek budi pekerti dalam mekanisme pengajaran PPKn, dapat dilihat dalam hal sebagai berikut.
 - a. Berdasarkan pengamatan terhadap proses belajar mengajar baik dalam pokok bahasan kedisiplinan maupun ketaatan, ternyata guru belum mampu menggunakan metode yang proporsional dan dapat menumbuhkan aspek budi pekerti para siswa.

Belum tumbuhnya aspek budi pekerti ini terutama di kelas 3 IPS-4. Hal ini tampak dengan banyaknya siswa yang kurang berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar bahkan tidak memperhatikan ketika guru mengajar. Dalam pembelajaran, guru hanya menggunakan metode ceramah dan sesekali tanya jawab. Guru tidak mencoba menggunakan metode yang dapat menggugah aspek budi pekerti para siswa, seperti diskusi, bermain peran, atau metode lain yang relevan.

- b. Untuk menunjang terposisikannya aspek budi pekerti dalam mekanisme pengajaran, guru PPKn selalu bekerjasama dengan pihak lain yang terkait terutama dengan guru BP, serta PKS Urusan Kesiswaan. Kerjasama tersebut terutama dalam melaksanakan tata tertib sekolah.

5.2 Rekomendasi

Pada bagian akhir dari tulisan tesis ini, diajukan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pihak lembaga dan perorangan sebagai berikut

5.2.1 Kepada Lembaga

- 1) Mata pelajaran PPKn dalam kurikulum SMU 1994, sarat dengan muatan aspek budi pekerti. Demikian pula mata pelajaran yang lainnya seperti pelajaran Agama dan Bahasa Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah cq. Departemen Pendidikan Nasional tidak perlu menambah mata pelajaran khusus yang berhubungan dengan budi pekerti (mata pelajaran Pendidikan Budi Pekerti).

- 2) Pembinaan budi pekerti pada dasarnya merupakan tanggung jawab seluruh guru, oleh karenanya LPTK hendaknya mampu menyiapkan calon-calon pendidik yang berkualitas dan memiliki kemampuan dalam upaya pembinaan budi pekerti para siswa.
- 3) Kemampuan menggunakan metode mengajar yang dapat menanamkan aspek budi pekerti dalam pengajaran, multak dimiliki oleh guru PPKn, demikian pula oleh guru-guru lainnya. Oleh karena itu, hendaknya pihak sekolah berupaya untuk meningkatkan kemampuan para guru, dengan mengikutsertakan penataran, pelatihan, seminar atau kegiatan lain yang relevan secara rutin.
- 4) Pembinaan budi pekerti para siswa tidak hanya merupakan tanggung jawab sekolah, tetapi juga merupakan tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu, jalinan kerjasama antara sekolah, orang tua dan masyarakat hendaknya terus dibina dan ditingkatkan seperti : dukungan terhadap mengefektifkan waktu libur dengan kegiatan-kegiatan kerohanian, penyuluhan masalah narkoba, dan kegiatan lainnya.
- 5) Kegiatan-kegiatan yang menunjang pembinaan perilaku siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan kegiatan-kegiatan lainnya, hendaknya dilaksanakan secara terarah dan terencana, sehingga dapat membantu terhadap upaya pembinaan perilaku para siswa tersebut.
- 6) Pemberian sangsi yang tegas bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah hendaknya terus dilaksanakan, karena hal tersebut dapat membantu tertanamnya budi pekerti para siswa.
- 7) Keteladanan merupakan faktor penting bagi pembinaan budi pekerti. Oleh karena itu pihak sekolah hendaknya menganjurkan agar seluruh aparat sekolah senantiasa

memberikan suritauladan kepada para siswa dalam melaksanakan norma-norma yang berlaku, seperti : hadir melaksanakan tugas tepat waktu, berpakaian sopan dan rapi, menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta melaksanakan seluruh tugas yang ditetapkan oleh sekolah.

5.2.2 Kepada Guru PPKn

- 1) Kurang terposisikannya aspek budi pekerti dalam materi pelajaran yang terdapat pada buku sumber dan satuan pelajaran tentang pokok bahasan kedisiplinan dan ketaatan, hendaknya dapat mendorong guru PPKn untuk menambahnya dari sumber yang lain yang relevan dengan pokok bahasan tersebut.
- 2) Agar posisi aspek budi pekerti dalam pola pengajaran PPKn lebih tampak, maka dalam merumuskan tujuan pembelajaran khusus, materi pelajaran dan evaluasi dalam satuan pelajaran, hendaknya rumusan-rumusan tersebut tidak hanya berbobot kognitif, akan tetapi juga afektif dan psikomotorik.
- 3) Posisi aspek budi pekerti dalam mekanisme pengajaran baik dalam pokok bahasan kedisiplinan maupun ketaatan belum tampak dilakukan oleh guru. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan keterampilan proses dengan multi metode dan multi media sebagaimana terdapat dalam satuan pelajaran hendaknya dapat dilaksanakan secara nyata.
- 4) Evaluasi secara berlanjut dan menyeluruh merupakan salah satu alternatif yang bisa pula mengevaluasi aspek budi pekerti. Oleh karena itu, evaluasi hendaknya tidak hanya mengandalkan kepada evaluasi tertulis, akan tetapi juga hasil pengamatan serta kegiatan lain yang relevan.

- 5) Hendaknya kerjasama yang baik antara guru PPKn khususnya dengan guru BP dan wakil kepala sekolah Urusan Kesiswaan terus dibina dan ditingkatkan, seperti : memanfaatkan gambaran perilaku siswa dari BP dan wakasek kesiswaan dalam menetapkan nilai akhir.

